

**KEKERASAN PADA ANAK DI INDONESIA: FAKTOR PENYEBAB,
DAMPAK PSIKOLOGIS, DAN STRATEGI PENCEGAHANNYA**

Rini¹, Aura Prisca², Agam Malik³, Heru Kurniawan⁴
rini123@gmail.com¹, auraprisca83@gmail.com², malikmuhammad101010@gmail.com³,
herukurniawan2307@gmail.com⁴
Universitas Pamulang

Abstrak

Tantangan sosial utama di Indonesia adalah berlanjutnya kekerasan terhadap anak, yang diamati di dalam rumah tangga, lembaga pendidikan, dan ruang publik. Realitas ini menunjukkan bahwa anak-anak terus menghadapi ancaman terhadap hak-hak dasar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor etiologi, dampak psikologis, dan langkah-langkah pencegahan yang terkait dengan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Melalui lensa kualitatif deskriptif, studi ini meneliti literatur nasional dan internasional yang relevan dari tahun 2018 hingga 2025. Temuan yang diidentifikasi mengungkapkan bahwa kesulitan ekonomi, pendekatan pengasuhan otoriter, ketidaksetaraan gender, dan mekanisme perlindungan anak yang lemah merupakan kekuatan dominan yang mendorong kekerasan terhadap anak. Dampaknya berkepanjangan, memengaruhi tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kondisi psikologis seperti depresi dan kecemasan, dan melanggengkan kekerasan lintas generasi. Penting untuk pencegahan yang efektif adalah tindakan terkoordinasi lintas sektor—keluarga, sekolah, dan pemerintah—yang dipromosikan oleh pendidikan pengasuhan positif dan penguatan undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa melindungi anak dari kekerasan lebih dari sekadar mandat hukum atau kelembagaan; Merupakan suatu keharusan moral kolektif dan upaya masyarakat untuk memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap anak di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Trauma Psikologis, Perlindungan Anak, Keluarga, Indonesia.

Abstract

A primary societal challenge in Indonesia is the persistence of child violence, observed within households, educational establishments, and public domains. This reality indicates that children continue to face threats to their basic rights. This inquiry aims to determine the etiological factors, psychological impacts, and preventive measures associated with child abuse in the Indonesian setting. Through a descriptive qualitative lens, the study examined relevant national and international literature from 2018 to 2025. The identified findings reveal that economic hardship, authoritarian parenting approaches, gender inequity, and weak child protection mechanisms are the predominant forces driving violence against children. The repercussions are protracted, affecting not only physical health but also psychological states like depression and anxiety, and perpetuating violence across generations. Essential for effective prevention is coordinated action across sectors—families, schools, and government—promoted by positive parenting education and the solidification of child protection laws. This research underscores that safeguarding children from violence is more than a legal or institutional mandate; it is a collective moral imperative and societal endeavor to ensure a secure and supportive environment for every child in Indonesia.

Keywords: Child Violence, Parenting, Psychological Trauma, Child Protection, Social Policy.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial yang mendesak di Indonesia adalah kekerasan terhadap anak, yang sulit dieliminasi karena meliputi tindakan fisik, emosional, verbal, dan seksual dengan implikasi jangka panjang pada perkembangan individu. Hal ini terkonfirmasi melalui informasi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA, 2024), Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 15.500 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia. Angka yang dilaporkan ini diperkirakan tidak mencerminkan jumlah kasus

sebenarnya, sebab intimidasi, pandangan negatif masyarakat, dan tekanan sosial membuat korban dan keluarga enggan melaporkan banyak kejadian.

Legitimasi kekerasan anak dalam bingkai budaya Indonesia seringkali bersumber dari pemahaman sosial yang menyimpang. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pemberian sanksi fisik adalah bagian tak terpisahkan dari proses mendidik dan mendisiplinkan. Misalnya, pemukulan diartikan sebagai bentuk kepedulian agar anak tidak bertingkah. Pandangan semacam ini menggarisbawahi bahwa kekerasan sudah menjadi fenomena yang dinormalisasi dalam tradisi pengasuhan. Pada sistem patriarki yang dominan, anak ditempatkan pada posisi yang harus tunduk tanpa diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat atau memprotes perlakuan yang tidak adil.

Tekanan ekonomi, terlepas dari pengaruh budaya, turut berkontribusi signifikan. Kemiskinan kronis yang melanda banyak keluarga di Indonesia kerap menimbulkan stres emosional pada orang tua akibat beban finansial. Situasi ini berujung pada anak yang menjadi sasaran pelampiasan frustrasi atau dampak konflik dalam rumah tangga. Penelitian Na'imah dan Indriyani (2019) menunjukkan terjadi dua kali lipat lebih banyak insiden kekerasan pada anak di keluarga berekonomi menengah ke bawah dibandingkan keluarga yang lebih mapan secara finansial, ditambah lagi keterbatasan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan jiwa semakin memperparah kondisi.

Dampak kekerasan pada anak melampaui cedera fisik, merasuk ke dalam luka psikologis mendalam yang berpotensi merusak. Lingkungan yang dipenuhi kekerasan dapat memicu gangguan emosional pada anak, seperti kegelisahan berlebih, kesulitan dalam bersosialisasi, dan kemerosotan akademis. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa pelaku kerap kali adalah orang yang dipercaya, yang menyebabkan anak merasakan konflik internal, kebingungan, dan rasa bersalah yang kompleks, seringkali membutuhkan intervensi profesional.

Sekolah, sama halnya dengan keluarga, memiliki kemungkinan menjadi ladang terjadinya perundungan. Bentuk-bentuknya bisa mencakup praktik intimidasi, diskriminasi, atau penjatuhan hukuman fisik berlebih oleh para guru. Padahal, seharusnya sekolah berfungsi sebagai lingkungan kondusif dan suportif bagi pertumbuhan anak. Fenomena cyberbullying yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir juga menciptakan ancaman kontemporer, terutama bagi anak-anak dari jenjang sekolah dasar hingga remaja. Keterikatan dengan teknologi menyebabkan eskalasi kekerasan sulit dikendalikan, sebab tidak lagi terikat oleh batasan spasial maupun temporal.

Kendati pemerintah telah melangkah untuk mempertegas kerangka perlindungan anak melalui legislasi seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, aktualisasi kebijakan tersebut masih menemukan kesulitan substantif di tingkat operasional. Banyak daerah yang belum memiliki tata kelola perlindungan yang terintegrasi, serta petugas yang berwenang menangani insiden kekerasan anak sering kali kekurangan kapabilitas atau sumber daya yang memadai. Kurangnya sinergi antara institusi juga berujung pada kelambatan dalam penyelesaian perkara.

Oleh karena kerumitannya, upaya memahami dan mengatasi kekerasan terhadap anak harus diadopsi melalui pendekatan multidimensional. Pendekatan ini tidak terbatas pada kerangka hukum semata, melainkan juga harus mengintegrasikan dimensi-dimensi sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi. Kajian ini berupaya untuk mendeskripsikan secara holistik asal-usul isu kekerasan anak di Indonesia sekaligus menguraikan strategi preventif yang dapat diimplementasikan dengan memperhatikan kondisi spesifik daerah dan kebudayaan masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur sistematis dalam kerangka kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman holistik mengenai fenomena kekerasan anak melalui sintesis temuan studi-studi terdahulu. Data riset dikumpulkan dari publikasi jurnal ilmiah nasional dan internasional terbitan 2018-2025, dilengkapi dengan laporan resmi lembaga pemerintah yang relevan, mencakup KemenPPPA, UNICEF, dan KPAI.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian digital menggunakan kata kunci *child abuse*, *child protection in Indonesia*, *family violence*, dan *psychological trauma in children*. Sebanyak 40 artikel ditemukan pada tahap awal, kemudian diseleksi menjadi 20 artikel yang paling relevan berdasarkan kriteria: (1) penelitian membahas konteks kekerasan anak di Indonesia, (2) memuat data empiris atau analisis kebijakan, dan (3) diterbitkan oleh penerbit bereputasi seperti Elsevier, Springer, atau Wiley.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, yang membagi temuan menjadi tiga tema utama: (1) faktor penyebab kekerasan, (2) dampak psikologis, dan (3) strategi pencegahan. Validitas informasi dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan mencocokkan temuan dari studi akademik dan rilisan instansi pemerintah, selanjutnya analisis disajikan sebagai narasi yang berargumen untuk menciptakan pemahaman yang terintegrasi dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan Anak

Indonesia menyaksikan berbagai manifestasi kekerasan anak, mulai dari insiden fisik, ancaman verbal, tekanan emosional, eksploitasi seksual, hingga pengabaian. Kekerasan fisik masih menduduki peringkat teratas dalam frekuensi kejadian. Merujuk pada laporan KemenPPPA (2024), sekitar 54% dari kasus kekerasan anak yang tercatat melibatkan serangan fisik seperti pemukulan, tendangan, atau cubitan kuat yang meninggalkan jejak luka. Ironisnya, kekerasan verbal dan emosional acapkali tidak dilaporkan karena persepsi dianggap tidak signifikan, meskipun dapat menimbulkan dampak yang setara beratnya dengan kekerasan fisik.

Kekerasan seksual digolongkan sebagai bentuk paling rumit dan krusial karena kerap terjadi di lingkungan domestik, yang ironisnya, seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Pelaku mayoritas adalah figur keluarga, misalnya ayah, paman, atau kerabat kandung. Bentuk pelecehan sedarah yang teramati di berbagai lokasi membuktikan bahwa kekerasan terhadap anak tidak semata-mata bersumber dari luar rumah, namun juga dari tatanan keluarga itu sendiri (Suyanto et al., 2019). Fenomena kekerasan daring (*cyber violence*) turut menghadirkan aspek baru, khususnya bagi generasi muda yang intensif berselancar di ranah digital. Perundungan siber kerap memicu luka batin mendalam dan merusak kepercayaan diri, dampak yang tak kalah serius dibandingkan agresi fisik.

Pewarisan kekerasan dalam rumah tangga antar generasi merupakan fenomena yang umum terjadi, di mana individu yang pernah mengalami kekerasan saat kecil memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Situasi ini diidentifikasi sebagai penularan kekerasan lintas generasi, mengindikasikan bahwa kekerasan merupakan reproduksi berkelanjutan dari pola sosial dan emosional, bukan sekadar tindakan individu (Uktubara & Hendariyanto, 2024). Oleh sebab itu, pemutusan rantai kekerasan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga psikososial.

B. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Kejadian kekerasan pada anak bukanlah fenomena yang terjadi begitu saja, melainkan terjalin dari kompleksitas interaksi antara aspek personal, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Analisis tinjauan pustaka menunjukkan adanya beberapa determinan kunci:

1. Tekanan Ekonomi dan Kemiskinan

Tekanan ekonomi yang parah sering kali menjadi faktor penyebab utama, di mana orang tua yang mengalami kesulitan finansial berat kerap merasakan stres emosional yang signifikan. Situasi ini kemudian berpotensi memicu tindakan impulsif terhadap anak. Di sisi lain, pada sebagian situasi, anak justru dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk meringankan beban ekonomi keluarga, yang pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi.

Penelitian Na'imah & Indriyani (2019) Penelitian mengindikasikan bahwa rumah tangga dengan pendapatan di bawah ambang batas kemiskinan berisiko dua kali lipat lebih tinggi melakukan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan rumah tangga yang secara finansial stabil. Anak kerap dijadikan sasaran luapan emosi negatif dan representasi kegagalan ekonomi keluarga saat kebutuhan fundamental tidak tercukupi.

2. Pola Asuh dan Budaya Disiplin Keras

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih meyakini pandangan bahwa "kekerasan fisik terhadap anak merupakan elemen dari proses pendidikan". Gaya pengasuhan yang cenderung otoriter ini kerap diasumsikan sebagai metode paling ampuh dalam menanamkan disiplin. Namun, dalam praktik sesungguhnya, tindakan kekerasan hanya melahirkan rasa takut, bukannya kepatuhan sejati. *Haditono (1981)* Telah lama dicatat bahwa dalam struktur budaya patriarki, di mana orang tua memegang otoritas penuh, perlakuan kasar terhadap anak seringkali dipandang sebagai hal yang lazim.

3. Kurangnya Pengetahuan tentang Hak Anak

Mayoritas orang tua belum menyadari hak-hak fundamental anak yang dijamin oleh hukum. Ketiadaan edukasi mengenai hak anak, khususnya di wilayah pedesaan, menjadikan perlakuan kasar sebagai bagian dari "pembentukan karakter". Keterbatasan pemahaman ini semakin parah akibat minimnya jangkauan informasi dan konsultasi keluarga.

4. Lemahnya Sistem Perlindungan dan Penegakan Hukum

Walaupun Undang-Undang Perlindungan Anak telah diberlakukan, implementasinya kerap menemui hambatan efektivitas. Sejumlah perkara terhenti pada fase pelaporan akibat kekhawatiran korban atau keluarga terhadap stigma masyarakat. Ditambah lagi, aparat penegak hukum acapkali kurang peka terhadap anak, khususnya selama investigasi. Kondisi ini menghasilkan lingkaran impunitas yang memungkinkan pelaku merasa terbebas dari tanggung jawab hukum.

5. Faktor Sosial dan Lingkungan

Kondisi sosial yang menoleransi kekerasan memperparah keadaan. Di tengah masyarakat yang menganggap hukuman fisik sebagai hal lumrah, kekerasan dipandang sebagai metode pengawasan sosial. Lebih lanjut, kepadatan penduduk dan tingginya angka perselisihan memperbesar peluang anak mengalami kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Dampak Psikologis Kekerasan terhadap Anak

Terhadap anak, kekerasan mengukir jejak psikologis yang dalam dan berkelanjutan. Konsekuensi ini bermanifestasi dalam periode singkat dan juga lama, yang secara konsisten berdampak pada setiap dimensi eksistensi anak.

1. Gangguan Emosional dan Kecemasan

Anak-anak yang mengalami kekerasan kerap menampilkan tanda-tanda gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang meliputi mimpi buruk, ketakutan ekstrem, dan kecenderungan panik mendadak; kondisi ini juga memanifestasikan diri dalam gangguan tidur serta hambatan konsentrasi dalam lingkungan pendidikan. *Dhamayanti et al. (2020)* Temuan menunjukkan anak-anak di Indonesia yang mengalami kekerasan menunjukkan prevalensi depresi dan kecemasan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan dalam

lingkungan yang tidak mengalami kekerasan.

2. Gangguan Kepercayaan dan Relasi Sosial

Anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya dari figur terdekat, acap kali kehilangan keyakinan pada orang lain. Mereka merasakan dunia sebagai tempat yang tidak aman dan orang dewasa sebagai figur yang tidak dapat dipercaya. Situasi ini berdampak negatif pada kemampuan anak dalam membentuk hubungan sosial yang sehat kelak.

3. Rendahnya Harga Diri dan Perilaku Agresif

Peristiwa kekerasan seringkali meninggalkan jejak berupa rendahnya harga diri pada individu yang mengalaminya. Kondisi ini muncul akibat perasaan tidak berharga yang timbul dari pengalaman dihina atau diremehkan secara berkelanjutan. Respon anak-anak terhadap dampak ini bervariasi, ada yang memilih untuk mengasingkan diri, sementara sebagian lainnya menunjukkan perilaku agresif dan seringkali mudah tersulut amarah. Kedua pola respons tersebut sejatinya berfungsi sebagai strategi pertahanan diri dalam menghadapi luka emosional yang belum teratasi.

4. Dampak Jangka Panjang

Konsekuensi kekerasan tidak terbatas pada masa kanak-kanak saja. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa individu yang mengalami kekerasan saat kecil memiliki probabilitas lebih tinggi menderita depresi, ketergantungan, dan menjadi pelaku/korban kekerasan dalam relasi dewasa. Secara sosiologis, perundungan pada anak bertransformasi menjadi "wabah sosial" yang merembet antar generasi.

D. Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

1. Penguatan Peran Keluarga

Keluarga merupakan benteng pertama perlindungan anak. Upaya pencegahan dapat dimulai dengan membangun kesadaran pengasuhan positif, di mana disiplin dilakukan dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Program pendidikan keluarga yang dikembangkan KemenPPPA telah menunjukkan hasil positif di beberapa provinsi, khususnya dalam menurunkan kekerasan domestik.

2. Pendidikan dan Sekolah Ramah Anak

Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang. Guru perlu diberikan pelatihan tentang pendekatan disiplin tanpa kekerasan serta teknik konseling dasar. Program *Sekolah Ramah Anak* yang dicanangkan pemerintah perlu diperluas agar mencakup aspek kesehatan mental siswa, bukan sekadar infrastruktur fisik.

3. Intervensi Komunitas

Komunitas memiliki peran penting dalam membangun budaya perlindungan anak. Beberapa daerah telah menerapkan program berbasis komunitas seperti *Pos Perlindungan Anak* dan *Forum Anak Desa*. Program ini memfasilitasi ruang bagi anak untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa rasa takut.

Salah satu contoh sukses adalah *Families First Program* di Jawa Barat yang berfokus pada pelatihan pengasuhan tanpa kekerasan bagi orang tua. Evaluasi *Ruiz-Casares et al. (2022)* menunjukkan program ini berhasil menurunkan angka kekerasan rumah tangga hingga 25%.

4. Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik

Kebijakan yang tegas dan berpihak pada anak harus diperkuat. Aparat penegak hukum perlu dilatih agar memiliki kepekaan terhadap kasus yang melibatkan anak. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem pelaporan yang ramah anak dan mudah diakses masyarakat. Perlindungan anak juga harus diintegrasikan dengan kebijakan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

5. Peran Media dan Teknologi

Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu,

kampanye anti-kekerasan perlu digalakkan melalui berbagai platform media, termasuk media sosial. Literasi digital bagi anak juga penting untuk melindungi mereka dari kekerasan daring dan eksploitasi online.

E. Analisis dan Sintesis Temuan

Hasil kajian memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sistemik yang tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal. Faktor ekonomi, budaya, dan psikologis saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Oleh sebab itu, strategi pencegahan harus bersifat multidimensi.

Dari sisi keluarga, perlu ada transformasi nilai pengasuhan. Dari sisi masyarakat, dibutuhkan budaya baru yang menolak segala bentuk kekerasan. Sedangkan dari sisi negara, dibutuhkan penegakan hukum yang adil dan sistem perlindungan sosial yang efektif.

Kekerasan terhadap anak bukan sekadar isu perlindungan individu, tetapi juga cerminan kualitas moral dan sosial bangsa. Negara yang gagal melindungi anak-anaknya sesungguhnya sedang menyiapkan generasi yang rapuh dan penuh luka batin. Maka, perlindungan anak harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan manusia yang beradab dan berkeadilan sosial.

KE S I M P U L A N

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pola asuh otoriter, ketimpangan gender, serta lemahnya sistem perlindungan menjadi penyebab utama yang memperparah situasi. Dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, menciptakan luka batin mendalam dan berpotensi melahirkan siklus kekerasan antar generasi.

Pencegahan kekerasan anak membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Edukasi pengasuhan positif, penguatan kebijakan hukum, dan intervensi komunitas merupakan strategi efektif untuk menekan angka kekerasan. Lebih dari itu, perubahan budaya menjadi faktor kunci: masyarakat harus meninggalkan paradigma bahwa kekerasan adalah bagian dari disiplin.

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga bentuk investasi sosial bagi masa depan bangsa. Dengan membangun lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung tumbuh kembang anak, Indonesia dapat melahirkan generasi yang sehat, berdaya, dan berakhlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Amalia, L. (2021). Pengasuhan positif dalam keluarga: Strategi mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga. *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, 13(2), 121–132. <https://doi.org/10.21009/jpk.132.05>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Dhamayanti, M., Rachmawati, P. D., & Nurhidayah, I. (2020). The association of depression with child abuse among Indonesian adolescents. *BMC Pediatrics*, 20(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12887-020-02218-2>
- Haditono, S. (1981). *Perkembangan dan masalah anak di Indonesia: Tinjauan psikologi sosial*. Jakarta: UI Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Anak 2023*. Jakarta: KemenPPPA.
- Khiatani, P. V., Raharjo, S., & Gebrekidan, D. (2025). Advancing child protection systems in Indonesia and Ethiopia: Comparative insights. *Child Abuse & Neglect*, 153, 106520.

- <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.106520>
- Na'imah, T., & Indriyani, R. (2019). Forms of child abuse in poor families in Purwokerto, Indonesia. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30589.23527>
- Ruiz-Casares, M., O'Leary, P., & Mulia, A. (2022). Families First: Community-based intervention to prevent violence against children in West Java. *Prevention Science*, 23(4), 654–672. <https://doi.org/10.1007/s11121-021-01230-4>
- Rumble, L., Ramly, A. A., Nuryana, E., & Dunne, M. P. (2018). Childhood sexual violence in Indonesia: Evidence from a national survey of 13–24-year-olds. *Child Abuse & Neglect*, 76, 84–93. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.10.007>
- Suyanto, B., Faturochman, F., & Arifin, A. (2019). Incestuous abuse of Indonesian girls: Family dynamics and social consequences. *Children and Youth Services Review*, 102, 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2019.04.021>
- Syukriani, M., Setyowati, R., & Nugraha, D. (2022). Cyberbullying among adolescents in Indonesia: The role of parental control and peer influence. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 29(3), 201–212.
- Thalib, T., Rahmadani, D., & Yusuf, F. (2025). Adverse childhood experiences and neurovegetative outcomes in early adulthood. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/h54tr>
- Uktubara, A. L. R. A., & Hendariyanto, V. I. (2024). Intergenerational cycles of violence: A psychosocial perspective on Indonesian families. *Journal of Family and Community Studies*, 8(1), 45–58.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Ending violence against children in Indonesia: Annual situation report 2023*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law, and policy. *Child Abuse & Neglect*, 95, 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>
- Yosep, I., Mardhiyah, A., & Susanti, I. (2024). A scoping review of nursing interventions to reduce PTSD in adolescents who have been sexually abused. *BMC Nursing*, 23(1), 12–24. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01215-0>
- Zulkarnaen, M., & Widyastuti, S. (2020). Analisis faktor sosial dan budaya terhadap kekerasan anak di pedesaan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.23887/jish.v9i1.23321>